

ETIKA POLITIK MENURUT FRANZ MAGNIS-SUSENO**Kornelius Naitili¹, Benigno Nainggolan²**^{1,2}Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, MedanEmail: nainggolanbenigno@gmail.com**ABSTRAK**

Artikel ini membahas pemikiran Franz Magnis-Suseno tentang etika politik sebagai salah satu cabang filsafat moral yang mengkaji dimensi politis kehidupan manusia. Pemikiran Magnis-Suseno berangkat dari refleksi kritis atas politik yang seringkali dipandang sebagai arena perebutan kekuasaan yang kotor dan pragmatis. Etika politik dalam pandangannya bertujuan untuk memberikan orientasi moral, membimbing legitimasi kekuasaan, serta mengarahkan politik pada *bonum commune* (kebaikan bersama). Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan riset kepustakaan (*library research*), yang menelaah karya-karya utama Magnis-Suseno, terutama *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, serta literatur filsafat klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Magnis-Suseno menegaskan tiga aspek penting etika politik: legitimasi kekuasaan harus berdasarkan keadilan, politik sebagai sarana mewujudkan martabat manusia, serta keterlibatan kritis masyarakat dalam proses politik. Pemikiran ini memiliki relevansi tinggi bagi konteks politik Indonesia, terutama di tengah fenomena politik identitas, polarisasi, dan lemahnya etika publik.

Kata Kunci: *etika politik, bonum commune, legitimasi kekuasaan, filsafat moral*

PENDAHULUAN

Politik sebagai bagian integral dari hidup manusia yang berfungsi mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Politik menjadi sarana untuk membangun kepentingan bersama atau mewujudkan *bonum commune* yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan. Namun dalam praktiknya, politik sering dianggap sebagai hal yang negatif karena penuh dengan praktik kotor dan tidak bermoral. Hal ini terlihat dalam pemilihan kepada daerah (*pilkada*) di Indonesia yang sarat dengan muatan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (*SARA*). Akibatnya, Masyarakat lebih memilih pemimpin karena ada perasaan se-agama atau se-suku dibandingkan pemimpin yang memiliki kualitas dan keutamaan. Mencermati segala ketidakjelasan arah politik negara kita, yang acap kali mendapat cap kotor atau jahat, Franz Magnis-Suseno mengungkapkan bahwa etika politik dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.

Politik bukan hanya sekadar urusan teknik pemerintahan; ia menyentuh pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang bagaimana manusia seharusnya hidup bersama. Dalam praktik kontemporer, perdebatan mengenai kekuasaan, legitimasi, dan tujuan negara seringkali didominasi oleh pertimbangan teknis, pragmatis, atau instrumental—sehingga dimensi moral cenderung dikesampingkan. Di tengah fenomena globalisasi, polarisasi identitas, dan tekanan ekonomi-politik, tuntutan akan etika di ruang publik semakin mendesak.

Franz Magnis-Suseno menempatkan etika politik sebagai jawaban filsafatis terhadap tantangan tersebut: bukan hanya untuk “menghukum” praktik politik yang menyimpang, tetapi memberikan alat analitis dan pedoman normatif yang memungkinkan masyarakat menilai dan mereformasi struktur kekuasaan secara rasional dan bertanggung jawab. Pemikirannya bukan sekadar teori idealis; ia menautkan filsafat politik klasik dan teologi moral dengan kondisi konkret kehidupan politik Indonesia sejak Orde Baru hingga era Reformasi. Tujuan artikel ini adalah memberi pembacaan komprehensif terhadap etika politik Magnis-Suseno yang: (1) memetakan konsep utamanya; (2) menjelaskan metodologi etis yang ia tawarkan; (3) menelaah prinsip-prinsip moral dasar; dan (4) menerjemahkan relevansi tersebut menjadi rekomendasi praktis untuk pembentuk kebijakan, akademisi, dan warga negara. Dengan demikian pembaca diharapkan memperoleh gambaran yang tidak hanya teoretis tetapi juga aplikatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Sumber primer adalah karya Franz Magnis-Suseno, khususnya *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok filsafat Moral* (1987), *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (1987) dan *Etika Umum: Masalah-masalah pokok filsafat moral* (1975). Sumber sekunder berupa literatur yang membahas filsafat politik klasik (Plato, Aristoteles), pemikiran teologi politik (Agustinus, Aquinas), serta karya filsafat kontemporer di Indonesia dan berbagai sumber pendukung lainnya. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk mengungkapkan sintesis pemikiran etika politik Magnis-Suseno dan relevansinya bagi konteks Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Riwayat hidup dan Latar belakang Franz Magnis-Suseno

Franz Magnis-Suseno lahir di Eckersdorf, Jerman, pada tanggal 26 Mei 1936 dengan nama lengkap Franz Graf von Magnis. Ia anak sulung dari enam bersaudara. Orang tuanya bernama Ferdinand Graf von Magnis dan Maria Anna Gräfin von Magnis. Ia menetap di Indonesia sejak tahun 1961 dan resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada tahun 1977.¹

Franz Magnis-Suseno belajar filsafat, teologi dan teori politik di Pullach, Yogyakarta dan Munchen. Ia mendapat gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1973 dari Universitas Munchen. Selama perjalanan hidupnya, Franz Magnis-Suseno banyak mengabdikan diri sebagai seorang dosen di beberapa universitas, antara lain; Universitas Indonesia (1979-1984), Universitas Parahyangan, Bandung (1985-1993), juga menjadi dosen tamu pada Hochschule für Philosophie (1979), Geschwister-Scholl-Institut, Universitas Munchen (1986-1987), dan Universitas Innsbruck. Tahun 2002, Franz Magnis-Suseno menerima gelar doktor *honoris causae* dalam bidang teologi dari Universitas Luzern, Swiss.² Franz Magnis-Suseno juga masih aktif menghasilkan tulisan-tulisan yang berguna bagi kehidupan bangsa hingga sekarang ini. Bukan hanya itu, Franz Magnis-Suseno juga aktif dalam berbagai forum antaragama dan terlibat dalam pencarian etika kehidupan bangsa untuk abad ke-21. Tahun 2015, Franz Magnis-Suseno menerima Bintang Mahaputera Utama dari Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia.³

¹ Franz Magnis Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 22.

² Franz Magnis Suseno, *12 Tokoh Etika ...*, 22; bdk. Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik ...*, 405.

³ Franz Magnis-Suseno, *Katolik Itu Apa?* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 214 ; bdk. Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik ...*, 405.

Franz Magnis-Suseno telah menulis banyak karya, yang terdiri dari buku dan artikel. Hampir setengah karya tulisnya membahas persoalan etika. Buku-buku karya Franz Magnis-Suseno berkisar tentang isu-isu filsafat dan etika.⁴

Secara kronologis karya-karya Franz Magnis-Suseno disusun sebagai berikut: *Normative Voraussetzungen im Denkende jungen Marx* (1843-1848), Freiburg/Munchen tahun 1975, *Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius tahun 1975, *Javanische Weisheit und Ethik. Studien zu einer ostlichen Moral*, Munchen/Wein: Ondenbourg tahun 1981, *Kita Dan Wayang*, Jakarta: Leppenas tahun 1982, *Etika Jawa dalam Tantangan, sebuah bunga rampai*, bersama Dr. S. Reksosusilo Cm, Yogyakarta: Kanisius tahun 1984, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia tahun 1983, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia tahun 1986, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius tahun 1987, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia tahun 1987, *Neue Schwingen fur Garuda. Indonesien zwischen Tradition und Moderne*, Munchen: Peter Kindt tahun 1989, [Penyusun Utama] *Etika Sosial. Buku panduan Mahasiswa PB I- PB VI*, Jakarta: Gramedia tahun 1989, *Wayang dan Panggilan Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama tahun 1991, *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta: Gramedia tahun 1991, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius tahun 1992, *Filsafat-Kebudayaan-Politik: Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta: Gramedia tahun 1992, *Beriman Dalam Masyarakat: Butir-butir Teologi Kontekstual*, Yogyakarta: Kanisius tahun 1993, *Mencari Sosok Demokratis: Sebuah telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama tahun 1995, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-21*, Yogyakarta: Kanisius tahun 1997, *Tiga Belas Model Pendekatan Etika; Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato sampai dengan Nietzsche*, Yogyakarta: Kanisius tahun 1997, *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama tahun 1999, *Dua Belas Tokoh Etika abad ke-20*, Yogyakarta: Kanisius tahun 2000, *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama tahun 2003, *Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Obor tahun 2004, *Pijar-pijar Filsafat; Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Posmodernisme*, Yogyakarta: Kanisius tahun 2005 *Menalar Tuhan*, Yogyakarta: Kanisius tahun 2006, *Etika Abad ke-20; 12 teks kunci*, Yogyakarta: Kanisius tahun 2006, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Aktual*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara tahun 2015, *Katolik Itu Apa?*, Yogyakarta: Kanisius tahun 2017.⁵

2. Latar Belakang Pemikiran Frans Magnis-Suseno tentang Etika Politik Negara dan Keadilan menurut Plato

Plato menengahkan pemikirannya pada zaman masyarakat Yunani mengalami kemerosotan dalam semua bidang setelah mendapat kekalahan dalam perang Pelopenas. Pemerintahan negara menjadi rebutan orang-orang yang tidak memenuhi syarat, tetapi berambisi. Kekalahan Athena merangsang semangat Plato menengahkan pemikirannya tentang pola kehidupan kenegaraan yang ideal. Menurut Plato, negara yang ideal harus berdasar pada keadilan. Keadilan menurut Plato bukanlah secara individualistik yaitu sekadar keadaan di mana hak semua anggota masyarakat terjamin. Melainkan dipahami sebagai tatanan seluruh masyarakat yang selaras dan

⁴ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-butir Pemikiran Kritis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 255.

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 285-286; bdk. Frans Magnis-Suseno, *Katolik Itu ...*, 214.

seimbang. Bagi Plato, masyarakat harus dipersatukan oleh tatanan yang harmonis. Setiap anggota masyarakat memperoleh kedudukan sesuai dengan kodrat dan tingkat pendidikan mereka.

Plato membagi kedudukan pada suatu negara dalam tiga golongan. Golongan *pertama* adalah para penjamin makanan. Golongan ini adalah mereka yang bekerja agar barang kebutuhan manusia dapat tersedia: para petani, tukang, pedagang, buruh, pengemudi kereta, dan pelaut. Mereka tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemerintahan dan diatur oleh para penjaga karena hanya mereka yang memahami kepentingannya sendiri. Sebagai golongan yang mengusahakan kesejahteraan hidup bernegara, mereka boleh mempunyai harta pribadi serta boleh berumah tangga. Golongan *kedua* adalah para penjaga. Golongan ini mengabdikan diri seutuhnya pada kepentingan umum atau negara. Tugasnya menjamin supaya undang-undang dipatuhi rakyat. Mereka hidup dengan cara yang tidak mengizinkan perkembangan kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka tidak boleh berkeluarga, “wanita dan anak dimiliki bersama”, mereka tidak mempunyai hak milik pribadi dan hidup bersama dalam asrama. Mereka perlu diberi pendidikan intensif sejak umur dua tahun, dengan konsentrasi pada mata pelajaran yang mengembangkan disiplin dan kebijaksanaan: filsafat, gimnastik⁶, dan musik. Golongan *ketiga* adalah para pemimpin. Para pemimpin negara diambil dari antara para penjaga yang paling mendalami filsafat dengan jabatan tertinggi. Tugas mereka adalah membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Bagi Plato, filsuf adalah orang yang sanggup untuk melihat idea-idea atau hakikat-hakikat rohani di belakang bayang-bayang alam indrawi yang berubah-ubah. Seorang filsuf dapat memimpin masyarakat dengan berorientasi pada idea metafisik tertinggi, idea kebaikan. Menurut Plato, segala golongan yang ada dalam negara adalah alat semata-mata untuk kesejahteraan semuanya. Kesejahteraan semuanya itulah tujuan yang sebenarnya.

Kebahagiaan dan Etika Kebijaksanaan menurut Aristoteles

Aristoteles membahas *polis* dalam rangka permasalahan tentang tujuan manusia. Menurut Aristoteles, tujuan terakhir manusia adalah kebahagiaan (*eudaimonia*)⁷. Manusia yang telah mencapai kebahagiaan, tidak ada yang bisa ditambah. Aristoteles menyadari bahwa kebahagiaan hanya mungkin dicapai apabila kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*) tertata secara baik. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan negara sebagai tatanan kehidupan bersama untuk mengembangkan potensi-potensinya dalam satu masyarakat. Aristoteles lalu menarik kesimpulan bahwa tujuan negara adalah sama dengan tujuan manusia: agar manusia mencapai kebahagiaan. Maka, negara bertugas untuk mengarahkan kebahagiaan para warganya. Lebih jauh Aristoteles memberi suatu gambaran dengan cara apa kita memperoleh kebahagiaan itu. Banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan dialami sebagai kepenuhan ketika mereka telah memperoleh kekayaan atau kehormatan. Namun, kebahagiaan tidak dapat diperoleh melalui kekayaan atau kehormatan. Keduanya itu bukan menjadi tujuan, melainkan semata-mata hanya sebagai sarana. Menurut Aristoteles kehormatan yang populer di antara kaum bangsawan bukan menjadi tujuan

⁷ *Eudaimonia* berasal dari bahasa Yunani. Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata kebahagiaan. Secara hurufiah istilah ini mengacu pada kondisi bahagia. Istilah ini dipakai pada semua teori etika yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Bagi Aristoteles kata *eudaimonia* mengacu pada suatu usaha perwujudan diri yang melibatkan kegiatan dan usaha rasional yang disertai kesenangan. [Lihat K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani ...*, 88; bdk. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), 121.]

terakhir, melainkan keutamaan⁸ yang menjadi alasan manusia dihormati. Kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan suatu bentuk hidup yang dalam dirinya sendiri mempunyai nilai. Artinya, hanya dengan hidup bermoral kita dapat sampai pada kebahagiaan.

Kunci dari keutamaan adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu mencakup hidup baik pada umumnya. Aristoteles mendefinisikannya sebagai sikap tetap dalam bertindak sesuai dengan pengertian benar dan baik mengenai manusia. Secara sederhana orang itu bijaksana apabila ia tahu menjalani hidup yang bermutu. Contoh orang yang bijaksana misalnya, seseorang yang sangat terampil dengan sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan norma, hal itu membuktikan betapa sempurnanya ia menguasai ilmunya. Kebijaksanaan penting bagi manusia karena memungkinkan manusia bertindak dengan tepat dalam berbagai macam situasi. Kebijaksanaan membuat manusia menjadi pandai dan benar dalam membawa diri dan berkomunikasi dengan orang lain, serta menjadi tahu bagaimana bertindak dengan tepat dan etis. Bagi Aristoteles, manusia melalui tindakannya berinteraksi dengan orang lain dapat membawanya pada kebahagiaan. Tindakan manusia itu hanya bisa dengan jalan bernegara melalui politik. Tanpa berpolitik manusia tidak bisa berinteraksi.

Kedaulatan Allah menurut Agustinus

Agustinus membedakan dua *civitas* atau masyarakat: *pertama, civitas Dei* (“komunitas Allah”) adalah umat Allah dalam gereja yang akan mencapai kesempurnaannya pada akhir zaman. *Civitas Dei* diciptakan oleh cinta kepada Allah dan anggapan rendah terhadap dirinya sendiri. *Kedua, civitas terrena* (“komunitas duniawi”) adalah negara yang akan hancur pada akhir zaman. *Civitas terrena* diciptakan oleh cinta kepada dirinya sendiri disertai sikap menghina terhadap Allah. *Civitas terrena*, negara, sebetulnya merupakan sesuatu yang buruk, namun perlu juga karena manusia oleh dosa asal (dosa Adam, manusia pertama) telah dibuat menjadi egois dan mudah dipermainkan oleh nafsu-nafsunya. Menyadari kelemahan kesadaran moral manusia, diperlukan suatu kekuasaan duniawi yang menertibkannya. Negara bukan tujuan atau nilai pada dirinya sendiri, melainkan semata-mata sarana penertiban manusia yang masih diperlukan karena manusia pada hakikatnya sendirian (tanpa rahmat Allah) buruk sifatnya.

Kedaulatan Hukum Kodrat menurut Thomas Aquinas

Thomas Aquinas (1224-1274) merupakan tokoh pemikir penting abad pertengahan di Eropa yang paling berpengaruh sampai hari ini. Melawan kehendak orang tuanya, suatu keluarga bangsawan Italia, ia masuk ke dalam tarekat Santo Dominicus, belajar di Universitas Napoli dan Koeln, kemudian menjadi profesor di Paris dan Roma. Ia meninggal dalam perjalanan ke Konsili (musyawarah umat Kristiani) di Lyon dalam umur 50 tahun. Dalam waktu singkat ini, ia menciptakan suatu karya yang (dalam edisi Paris 1871) memuat 34 jilid. Perhatian pada bidang kenegaraan dan politik hanya merupakan sebagian kecil dari jangkauan ulasan-ulasannya. Berhubung dengan hal tersebut, Franz Magnis-Suseno membatasi diri pada dua hal yang bagi kita relevan: (1) hubungan negara dengan hukum kodrat, dan (2) hal tujuan negara.

⁸ Kata keutamaan berasal dari bahasa Yunani: *arête*. Kata *arête* berarti sesuatu seperti “kebaikan” atau sesuatu “yang sangat baik”. [Lihat Jonathan Barnes, *Aristoteles: Bapak Ilmu Politik* (Judul asli: *Aristotle*), diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Graviti, 1993), 134-135.]

3. Etika Politik Menurut Franz Magnis-Suseno

Sebagai usaha ilmiah, filsafat pun dibagi ke dalam beberapa cabang, terutama menurut bidang yang dibahas. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis yang mempertanyakan apa yang ada dan filsafat praktis, bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada itu. Filsafat teoritis mempertanyakan apa itu manusia, alam, apa hakikat realitas sebagai keseluruhan, apa itu pengetahuan, apa yang dapat diketahui tentang Yang Transenden dan sebagainya. Dalam hal ini filsafat teoritis pun mempunyai suatu maksud praktis karena pemahaman yang dicarinya diperlukan manusia untuk mengarahkan kehidupannya. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika politik menurut Franz Magnis-Suseno adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Etika politik berfungsi “menyediakan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab secara rasional, objektif, dan argumentatif”. Lebih lanjut etika politik berusaha memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang memang menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.⁹

Bertitik Tolak dari Filsafat

Etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Istilah filsafat tidak digunakan oleh Franz Magnis-Suseno dalam arti “kebijaksanaan hidup”, “sikap hati”, “sistem nilai”, “pandangan dunia”, “usaha kebatinan”, “angan-angan” atau “cita-cita mengenai hal-hal luhur”, melainkan dalam arti ilmiah. Sebagai usaha ilmiah filsafat sejak lama mempunyai tempat dalam lingkungan akademis.¹⁰ Filsafat dihadapkan dengan politik menuntut agar segala hak untuk mengatur masyarakat dipertanggungjawabkan. Filsafat meningkatkan tekanan agar kekuasaan-kekuasaan politik mencari legitimasi. Filsafat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mendesak terus-menerus agar segala usaha pembangunan dihadapkan pada tuntutan legitimasi normatif dan demokratis.

Berdasar pada kehidupan Politis Manusia

Ketergantungan dan keterlibatan individu dengan masyarakat yang disingkat sebagai “kesosialan manusia” menyatakan diri dalam tiga dimensi: (1) dalam penghayatan spontan individual; (2) berhadapan dengan lembaga-lembaga; dan (3) melalui pengartian-pengartian simbolis terhadap realitas. Ketergantungan dari masyarakat pertama-tama dihayati manusia dalam kehidupan konkret dan spontan setiap hari. Dalam seluruh tindakannya, ia merasa ditentukan oleh kehadiran manusia-manusia lain. Manusia menemukan diri hanya dalam kebersamaan dengan orang lain, yang akrab dan dicintai atau dibenci. Suatu kehidupan dengan tiadanya orang lain sama sekali tidak dapat dibayangkan. Kehidupan bersama itu akan harmonis dan terjamin bila sistem politik sebagai penata kehidupan bersama berjalan dengan baik. Hubungan sosial itu bersifat berstruktur.

Ada kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi dalam kebersamaan dengan orang lain, dan ada lebih banyak lagi yang pemenuhannya sangat dipermudah apabila diusahakan bersama-sama. Menjamin agar fungsi-fungsi itu dapat lestari, dikembangkan pola-pola bertindak bersama yang tidak lagi tergantung dari orang-orang dan situasi-situasi tertentu yang disebut lembaga. Lembaga sebagai wadah dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Mengikuti pembagian oleh Hegel dalam karyanya *Filsafat*

⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik ...*, xxiii; bdk. F. Budi Hardiman, *Franz Magnis-Suseno Sosok dan Pemikirannya* (Jakarta: Kompas, 2016), 68.

¹⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik ...*, 1-2.

Hukum, organisasi kesosialan manusia dapat dibagi dalam tiga lingkaran: keluarga, masyarakat luas, dan negara. Dunia simbolik yaitu segala macam paham, kepercayaan, pandangan tentang makna realitas sebagai keseluruhan. Dunia simbolik pengartian-pengartian itu termasuk agama, pandangan dunia, sistem-sistem nilai dan pandangan moral, politik dan estetis, keyakinan-keyakinan falsafi dan segala macam ideologi. Sistem-sistem simbolis ini berusaha menjelaskan kepada manusia siapa dia, bagaimana ia menemukannya, apa yang baik dan buruk, yang bernilai dan tidak bernilai. Fungsi utama sistem-sistem itu adalah memberikan legitimasi terhadap struktur-struktur sosial yang dihadapi manusia sehingga ia mendapat orientasi dan kepastian.

Menggunakan Prinsip-Prinsip Dasar Etika

Dalam kehidupan berpolitik, prinsip bersikap baik terhadap siapa dan apa saja yang ada harus menjadi pegangan utama para pelaku politik. Sikap baik terwujud dalam sikap membela, melindungi, memberi ruang perkembangan terhadap masyarakat. Semua tindakan dan kebijakan harus demi keuntungan sebesar-besarnya dari orang sebanyak-banyaknya dengan tidak melanggar hak dan keadilan. Prinsip ini menuntut suatu pengetahuan tepat tentang realitas supaya dapat diketahui apa yang masing-masing baik bagi yang bersangkutan. Prinsip dasar kedua adalah prinsip keadilan yang mengatakan bahwa kita wajib untuk memberlakukan semua orang dengan adil. Artinya, dalam kehidupan berpolitik harus menghormati hak-hak mereka dan memberikan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama. Adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Tuntutan dasarnya keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang. Prinsip menghormati keutuhan manusia ini menuntut tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. Demi tercapainya tujuan dari politik, manusia bukanlah sebagai sarana. Walau demi tujuan yang baik, ia jangan pernah membiarkan diri dipakai sebagai alat saja, diperas, diperkosa dan diperbudak. Prinsip ini berdasarkan paham bahwa manusia adalah pribadi berpengertian dan berkehendak yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi.

Memakai Metode Etika

Etika politik pada umumnya tidak langsung menggarap realitas yang telah diangkat ke dalam pengertian ilmiah oleh ilmu-ilmu yang spesifik. Filsafat politik mengupas argumentasi dan pernyataan ilmu-ilmu politik dari segi hakikat dan realitas manusia secara spesifik. Mempersoalkan (bukan hanya menjelaskan) pola-pola legitimasi dan tuntutan normatif dasar yang dikemukakan. Etika politik secara hakiki membutuhkan masukan dari ilmu-ilmu politik tentang struktur realitas politik dengan permasalahan-permasalahannya. Etika politik bertugas merumuskan argumentasi dan pernyataan ilmu-ilmu politik dari segi hakikat dan realitas manusia secara spesifik, mempersoalkan (bukan hanya menjelaskan) pola-pola untuk menentukan kewajiban dan tanggung jawab dalam bidang politik. Franz Magnis-Suseno menguraikan prinsip-prinsip yang mendasari etika politik. Menurutnya, etika harus bertolak dari medan permasalahan dan di dalam kerangka acuan itu, masalah-masalah yang ada membutuhkan penanganan etis. Etika politik bertolak dari masalah-masalah normatif dalam bidang politik itu sendiri, dari persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam masyarakat.

Menciptakan Pemimpin yang Ideal

Pemimpin dengan kepemimpinannya memegang peran yang strategis dan menentukan dalam memajukan roda organisasi, menentukan kinerja suatu lembaga dan bahkan menentukan mati hidup atau pasang surutnya kehidupan suatu bangsa dan negara. Para pemimpin dipilih dan diberi kepercayaan untuk memimpin rakyat agar lebih sejahtera dan membangun daerah menjadi lebih maju. Di tangan pemimpinlah ditentukan bagaimana masa depan rakyat, dan di pundak para pemimpin itu digantungkan harapan-harapan rakyat yang dipimpin. Kesejahteraan umum sebagai kesejahteraan yang harus diusahakan oleh negara dalam diri para pemimpin, dirumuskan sebagai kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Kesejahteraan umum berkaitan dengan semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan tepat.

Bagi Franz Magnis-Suseno pemimpin adalah dia yang mampu menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan ketenteraman, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin dalam mempertahankan kekuasaan dan berpolitik harus menjunjung pada nilai moralitas berpolitik. Perlombaan untuk mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan dengan mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan bersama, harus dihindarkan oleh para pemimpin politik. Sebab tindakan tindak terpuji itu merusak hakikat dari politik itu sendiri.

4. Legitimasi Kekuasaan Religius yang Melahirkan Etika Politik

Etika politik menuntut agar kekuasaan politik dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum itu harus disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral). Kekuasaan politik zaman sekarang dituntut agar kekuasaannya dipertanggung-jawabkan secara etis. Paham legitimasi religius untuk tunduk begitu saja terhadap penguasa politik menciderai demokrasi.

Kekuasaan Religius

Inti paham kekuasaan religius yang tumbuh dalam budaya masyarakat Jawa ialah bahwa hakikat kekuasaan politik, bersifat adiduniawi dan adimanusiawi, berasal dari alam gaib atau termasuk Yang Ilahi. Manusia yang berkuasa dengan demikian bukan manusia biasa lagi, melainkan termasuk alam adiduniawi itu. Raja merupakan “medium yang menghubungkan mikrokosmos manusia dan makrokosmos Tuhan”

Franz Magnis-Suseno bertitik tolak dari paham kekuasaan (politik) tradisional yang dulu hidup dalam masyarakat Jawa. Secara tradisional, orang Jawa membagi realitas ke dalam dua wilayah: ke dalam alam lahir dan alam batin. *Pertama*, alam lahir adalah alam yang tampak sebagai realitas alam semesta, seperti bumi, udara, langit, gunung, lautan, tetumbuhan dan binatang. *Kedua*, alam batin diyakini berada di belakang alam lahir sebagai kekuatan gaib yang mampu menggerakkan. Alam batin oleh kepercayaan rakyat dipersonifikasi dalam pelbagai macam roh. Menurut paham Jawa, kekuasaan politik pada hakikatnya adalah zat ilahi sendiri. Seorang raja akan semakin berhasil berkuasa apabila ia mampu untuk memusatkan zat ilahi itu dalam dirinya sendiri. Ia mengalami alam gaib sebagai kekuatan dari kehidupan dan daripadanya ia bergantung. Demi maksud itu, raja mengumpulkan benda-benda keramat, mengunjungi candi-candi di tempat-tempat yang keramat dan bertapa di hutan untuk mendapat ilmu gaib.

Kemampuan raja menyatukan diri dengan alam batin itulah membuat kehidupan rakyat menjadi damai dan Sejahtera.

Objek Legitimasi

Legitimasi Materi Wewenang

Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya. Untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan syah? Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik: dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif, dan dalam kekuasaan (eksekutif) negara sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu mengambil tindakan. Terhadap hukum dikemukakan pertanyaan tentang hukum yang macam apa yang boleh dianggap syah. Apabila eksistensi negara dianggap dapat dibenarkan atau bahkan perlu, baru muncul pertanyaan-pertanyaan yang relevan bagi praktik kehidupan kenegaraan di mana jawaban-jawaban juga kontroversial: untuk apa negara boleh menggunakan kekuasaannya? Untuk apa saja yang nyata-nyata berada dalam kekuasaannya? Atau ada bidang-bidang kehidupan manusia dalam masyarakat yang tidak boleh dicampuri negara? Sejauh mana negara berhak untuk menuntut ketaatan dari warga-warganya dan sejauh mana para warga negara wajib taat terhadap negara

Legitimasi Subjek Kekuasaan

Legitimasi subjek kekuasaan mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekelompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara. Ada tiga macam legitimasi subjek kekuasaan yakni:

a. Legitimasi Religius

Legitimasi religius mendasarkan hak untuk memerintah pada faktor-faktor yang adiduniawi, bukan pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan empiris khusus penguasa. Paham legitimasi religius ini dapat dibedakan menjadi dua yakni: *pertama*, penguasa dipandang sebagai manusia yang memiliki kekuatan-kekuatan adiduniawi, ilahi, gaib, maka ia sudah bukan manusia biasa lagi dan wewenangnya tidak dapat diganggu gugat karena berhakikat adiduniawi. *Kedua*, mendasarkan wewenang penguasa pada penetapan oleh Allah. Dalam paham kedua, penguasa tetap manusia belaka. Ia tidak masuk ke dalam lingkup realitas gaib dan adiduniawi. Ia tetap berada di bawah hukum moral sama seperti setiap warga rakyat lainnya.

b. Legitimasi Eliter

Legitimasi eliter mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Paham legitimasi ini berdasarkan anggapan bahwa untuk memerintah masyarakat diperlukan kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh rakyat. Mereka yang memilikinya merupakan elite masyarakat dan negara dengan sendirinya berhak untuk memegang kekuasaan.

Kriteria Legitimasi

Legitimasi Sosiologis

Legitimasi sosiologis, atau lebih tepat “paham sosiologis tentang legitimasi”, mempertanyakan mekanisme mana yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Sosiologi mempertanyakan motivasi manakah yang

mendasari suatu tatanan kenegaraan nyata-nyata diterima dan disetujui oleh sebuah masyarakat. Franz Magnis-Suseno menyebutkan tiga motivasi penerimaan kekuasaan klasik sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber.

Legalitas dan legitimasi Etis

Legalitas menyangkut fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tuntutan legalitas itu sendiri merupakan suatu tuntutan etika politik. Kesesuaian tindakan kekuasaan dengan hukum merupakan prasyarat kemampuan negara modern untuk berfungsi. Hanya keteraturan tindakan kekuasaan politik menurut suatu hukum menjamin bahwa negara tidak merosot dan menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Namun, legalitas semata-mata tidak dapat menjamin legitimasi etis. Alasannya sederhana: legalitas hanya memakai hukum yang berlaku sebagai kriteria keabsahan. Padahal, belum tentu bahwa hukum yang berlaku sendiri dapat dibenarkan secara etis. Kesesuaian wewenang negara dengan sembarang hukum belum dapat menghasilkan dasar yang mencukupi keabsahan etis. Artinya, tidak sembarang hukum dapat dibenarkan. Hukum yang berlaku haruslah adil. Negara tidak membenarkan segala tindakan hanya dengan mengatakan bahwa tindakan itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila hukum itu tidak memadai, kalau ada undang-undang dan peraturan-peraturan yang sengaja dibuat kabur untuk memberikan legalitas bagi tindakan-tindakan politik negara yang meragukan secara moral tidak dapat dibenarkan. Legalitas belum menjamin moralitas negara.

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi-segi norma moral. Setiap tindakan negara, entah legislatif, entah eksekutif dapat dan harus dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Penanyaan itu merupakan unsur penting dalam pengarahannya kekuasaan ke pemakaian kebijakan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Legitimasi etis yang menjadi pokok bahasan etika politik tidak menyangkut masing-masing kebijakan dan kekuasaan politik, melainkan dasar kekuasaan politis itu sendiri. Bukan norma hukum masing-masing, melainkan sistem hukum sendiri sebagai tata tertib penataan normatif kehidupan masyarakat dipersoalkan. Ditanyakan hukum macam apa yang secara moral, dilihat dari segi prinsip-prinsip moral, berhak untuk menuntut ketaatan dan mana yang tidak.

5. Relevansi Pemikiran Franz Magnis-Suseno

Etika politik hadir untuk membahas prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern. Mengenai pandangan-pandangan dasar yang berkembang selama lebih dari dua ribu tahun, terutama dalam tiga ratus tahun terakhir, tentang bagaimana harkat kemanusiaan dan keberadaban kehidupan masyarakat dapat dijamin berhadapan dengan kekuasaan negara modern. Bangsa Indonesia juga mengalami perubahan-perubahan politik yang dasyat. Sistem otoriter Orde Baru diganti dengan sistem yang demokratis. Perubahan ini masih diperjuangkan oleh bangsa Indonesia untuk mengadakan kesejahteraan masyarakat yang adil.

Konsep kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Pemimpin dalam politik berperan dalam mengarahkan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik. Setiap warga negara hanya akan hidup bersatu, rukun, dan sejahtera apabila seorang pemimpin berkarakter kuat untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, negara kita membutuhkan pemimpin yang unggul, yang mampu menciptakan iklim yang baik bagi terwujudnya kebahagiaan. Ia tidak hanya mampu memerintah tetapi juga sekaligus

mampu mendengar suara rakyat yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang diartikan sebagai pelayanan bagi kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya dan memandang fasilitas kepemimpinan sebagai hal agar dapat melayani lebih baik.

Kesatuan dan kerukunan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Perjuangan demi kebaikan menjadi perjuangan politik kita. Setiap orang sebagai warga negara dan sebagai umat beriman mengembangkan semangat cinta kasih dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Membangun semangat kerendahan hati untuk menerima dan menghargai arti perbedaan serta membangun semangat toleransi positif dengan mengakui hak dan kebebasan masing-masing. Bila hal ini dihidupi oleh setiap orang, maka agama dan negara akan menjadi unsur-unsur positif dalam mewujudkan kesatuan menuju kesejahteraan bersama (*bonum commune*). Maka setiap pelaku politik dituntut melakukan tindakan dengan prinsip-prinsip etika politik seperti yang dikatakan oleh Franz Magnis-Suseno.

KESIMPULAN

Etika politik menurut Franz Magnis-Suseno merupakan suatu refleksi filsafati yang berupaya menjembatani kesenjangan antara praktik politik yang kerap terjebak dalam perebutan kekuasaan dan kebutuhan manusia akan tatanan hidup bersama yang adil serta bermartabat. Melalui pemikiran yang berakar pada tradisi filsafat klasik—Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Aquinas—serta diperkaya dengan konteks politik Indonesia, Magnis-Suseno mendefinisikan etika politik sebagai cabang filsafat moral yang menguji legitimasi kekuasaan, memberi pedoman normatif bagi kebijakan, sekaligus menjadi kritik ideologis terhadap penyalahgunaan wewenang. Prinsip-prinsip moral dasar yang ia tekankan—kebaikan, kesejahteraan umum, keadilan, dan penghormatan terhadap keutuhan manusia—menjadi ukuran yang jelas untuk menilai arah dan kualitas politik. Dengan metode refleksi kritis-negatif serta pengandaian normatif, etika politik ditempatkan bukan sekadar sebagai teori ideal, melainkan sebagai sarana praktis untuk menguji kebijakan, menuntut akuntabilitas pemimpin, dan membentuk partisipasi warga negara yang etis. Dalam konteks Indonesia yang kerap diwarnai oleh politik identitas, pragmatisme kekuasaan, dan lemahnya etika publik, pemikiran Magnis-Suseno menawarkan kerangka yang relevan untuk menegakkan demokrasi yang berkeadilan dan beradab. Dengan demikian, etika politik bukanlah sekadar wacana normatif, melainkan pedoman praksis untuk mengarahkan politik kepada tujuan sejatinya: mewujudkan *bonum commune*—kebaikan bersama yang menghormati martabat setiap manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, J. L. Ch. *Sekitar Etika dan Soal-soal Etis*. Jakarta: Gunung Mulia, 1996.
- Agus, A. Politik, panggilan untuk kebaikan bersama. Dalam M. Dua (Ed.), *Politik Katolik Politik Kebaikan Bersama: Sejarah dan Refleksi Keterlibatan Orang-Orang Katolik dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Obor, 2008.
- Cahyadi, T. K. *Katolik dan Politik*. Jakarta: Obor, 2006.
- Magnis-Suseno, F. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.
- Riyanto, E. A. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Rohaniah, Y., & Efrisa. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Sudarminta, J. *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Sumaryono, E. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius. 2006.
- Susetyo, B. *Hancurnya Etika Politik*. Jakarta: Kompas, 2004.
- Tjahjadi, S. P. L. *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.